

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DAN MODERNISASI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN

Oleh:
Risalatul Fariyah^{1*}, Binti Maunah²

ABSTRACT

The environment and community are two aspects that are functionally interconnected within the realm of ecology and ecosystems. The natural environment is considered one of the factors that determine the pattern of community life, while the community itself becomes a dominant factor affecting its environment. Therefore, all forms of community activity become phenomena that give a dominant character to a certain geographical area around them. Sociology, as the science that studies relationships among individuals within a society, also examines the social relationship of the community with its environment. The environment in question includes natural resources, soil, water, as well as the flora and fauna within it, which over time have undergone many changes in terms of utilization, initially in a local-traditional manner, and gradually shifting towards more technologically and digitally influenced approaches, especially in the present era closely associated with modernity. Therefore, to accommodate this matter, this study necessary to analyze the patterns of community interaction that previously still upheld elements of local wisdom in the environmental empowerment process, and then link it with modernity in the current era. Thus, the integration of values from both is expected to serve as a foundation for environmental empowerment that can promote sustainable social awareness.

ABSTRAK

Lingkungan serta komunitas masyarakat merupakan dua hal yang saling terkait secara fungsional dalam ranah ekologi dan ekosistem. Dimana lingkungan alam dianggap menjadi salah satu faktor yang menentukan corak kehidupan masyarakat dan masyarakat itu sendiri menjadi faktor dominan terhadap lingkungannya. Sehingga segala bentuk aktivitas masyarakat menjadi fenomena yang memberikan warna dominan terhadap suatu cakupan ruang geografis disekitarnya. Ilmu sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar individu dalam masyarakat turut mengkaji hubungan sosial masyarakat terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud meliputi sumber daya alam, tanah, air serta flora dan fauna di dalamnya yang dari waktu ke waktu banyak mengalami perubahan dalam hal pemberdayaan yang mulanya bersifat lokal-tradisional kemudian lambat laun terjadi perubahan ke arah yang lebih bersinggungan akan teknologi dan digitalisasi terlebih di masa kini yang sangat erat dengan modernitas. Sehingga untuk menyesuaikan hal tersebut, studi ini perlu dilakukan sebagai analisa terhadap pola interaksi masyarakat yang sebelumnya masih memegang unsur kearifan lokal dalam proses pemberdayaan lingkungan, lanjut dikaitkan dengan modernitas di era ini. Sehingga integrasi nilai dari keduanya yang diharapkan mampu menjadi dasar pemberdayaan lingkungan yang mampu mendorong kesadaran sosial secara berkelanjutan.

Keywords

sociology, anthropology, local customs, modernization, environmental preservation

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (*Corresponding Author: risalahfariyah@gmail.com)

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup berada di tengah-tengah manusia lainnya (lingkungan sosial), dalam konteks budaya (lingkungan budaya), dan alam semesta (lingkungan alam). Ketiga lingkungan tersebut merupakan tiga faktor yang memiliki jalinan hubungan secara fungsional (Sumaatmadja, 1996:15).

Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan jumlah populasi penduduk di berbagai wilayah menyebabkan adanya persaingan dalam perebutan sumber daya alam yang ada. Kompetisi untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada dapat menimbulkan eksploitasi yang berlebihan, dipicu oleh ambisi individu atau kelompok tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari sumber daya tersebut. Sayangnya, tak jarang dalam prosesnya manusia acapkali kurang menerapkan perilaku ramah lingkungan hingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada.

Salah satu isu lingkungan yang paling sering dibahas saat ini adalah pencemaran lingkungan (Tjahja dkk, 2014: 187). Misalnya membuang sampah, limbah, dan kotoran secara langsung tanpa mengindahkan lingkungan dan makhluk lain, penggundulan hutan demi kepentingan produksi, polusi udara, pencemaran air, tanah serta aktifitas lain yang berakar dari kurangnya perhatian manusia terhadap kestabilan lingkungan.

Manusia dan lingkungan sejatinya memiliki hubungan saling ketergantungan. Manusia yang seiring waktu akan terus

berinteraksi dengan alam sekitar, begitupun kelestarian alam itu yang bergantung pada kesadaran manusianya. Peningkatan nilai-nilai kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat sendiri mengenai signifikansi lingkungan yang bersih menjadi dasar fundamental untuk usaha pemberdayaan (El Adawiyah & Ramadhan, 2020:93). Pendidikan yang efektif dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih berpihak pada lingkungan. Komunitas memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan memahami, berpartisipasi secara aktif, dan melakukan tindakan nyata, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperbaiki kondisi lingkungan (Lesna Nainggolan et al., 2023:179).

Melalui tradisi, ritual, sistem kepercayaan, dan praktik-praktik lokal, masyarakat adat di Indonesia telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan ditunjukkan oleh berbagai studi yang mengidentifikasi korelasi positif antara keberadaan wilayah adat dan tingginya tutupan hutan serta keanekaragaman hayati (Sumarmi, 2015:43) .

Banyak praktik kearifan lokal yang justru terpinggirkan oleh pendekatan konservasi modern yang seringkali mengabaikan peran masyarakat adat (Nababan, 2003). Padahal, program pemberdayaan masyarakat di era saat ini melalui pelatihan, pendidikan, partisipasi aktif melalui penggunaan teknologi digital dan akses informasi sebagai sarana pendorong

program secara modern tersebut bisa turut diintegrasikan dengan aspek kearifan lokal yang bisa mengoptimalkan dan memfariasikan akses pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara lebih efisien kepada masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta melalui strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini berfokus pada kearifan lokal sebagai serangkaian nilai, norma, praktek hingga aturan adat yang telah tertanam di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dalam konsep pemberdayaan lingkungan oleh komunitas setempat. Kearifan lokal yang dinyatakan sebagai sistem nilai, praktik, dan pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan (Koentjaraningrat, 2009:180). Meski demikian tetap bersifat kontekstual terhadap konservasi pengelolaan alam secara berkelanjutan.

Menurut Gidden dalam bukunya berjudul *The Consequences of Modernity* ia menyatakan bahwa modernitas ditandai oleh teknologi tinggi, industrialisasi, birokratisasi, dan globalisasi. Modernisasi membawa perubahan masyarakat dari tradisional untuk beradaptasi terhadap pengaruh-pengaruh industrialisasi, urbanisasi dan adopsi teknologi tersebut. Sehingga jika menyangkut akan pemberdayaan lingkungan, diharapkan turut bisa melakukan pengelolaan dengan peluang teknologi yang

menyertainya. Adanya integrasi antara keduanya diharapkan turut bisa saling mempengaruhi melalui penciptaan teknologi tepat guna dan meminimalisir kekurangan dari keduanya.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode Kualitatif *Library Research*, dengan cara mengkaji beberapa literatur diantaranya termasuk buku, e-book, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan. Selanjutnya peneliti melakukan analisa hipotesis secara mendalam dengan cara meneliti, membaca, memahami dan mencatat berbagai sumber yang relevan kemudian mencoba memaparkan pokok-pokok pembahasan dan fenomena secara menyeluruh.

Data yang dihasilkan dari hasil penelitian berupa data deskriptif dan naratif yang mengungkap perspektif beberapa pihak yang turut berkontribusi dalam subyek tema penelitian, serta lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian yang telah ada sebelumnya terkait pada pokok pembahasan yang diusung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Lingkungan

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau pandangan dari suatu masyarakat yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat tersebut dan sudah dijalankan secara turun-temurun (Permana et al., 2011:67).

Dalam kaitannya akan pemberdayaan lingkungan hidup, Kearifan lokal mencerminkan etika ekologis masyarakat yang telah teruji dan terbukti selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan hubungan manusia dan alam saling terikat sebagai satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Warisan ini lah yang dianggap menjadi budaya dan pengetahuan lintas generasi yang tertanam kuat dari nenek moyang, sehingga kemungkinan eksploitasi dan kerusakan lingkungan adat akan semakin kecil sebagai akibat dari edukasi secara alami tersebut.

Menurut (Suhartini, 2009), kearifan lokal dari masyarakat adat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk: (1) kepercayaan, (2) pengetahuan, (3) praktik, dan (4) nilai sosial. Keempat bentuk ini saling berkaitan dan membentuk sistem yang komprehensif dalam pemberdayaan lingkungan.

Dalam prakteknya, beberapa faktor pendukung yang membuat kearifan lokal saling bersinggungan dengan pelestarian lingkungan meliputi :

- 1) Zonasi dan Kategorisasi Spasial: Hampir semua masyarakat adat yang diteliti menerapkan sistem zonasi wilayah yang mengatur intensitas pemanfaatan sumber daya. Baik wilayah yang telah dilabeli sebagai kawasan inti dengan pemanfaatan terbatas, hingga kawasan yang semestinya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- 2) Pengelolaan Berbasis Siklus dan Rotasi: Masyarakat adat menerapkan sistem rotasi dalam pemanfaatan sumber daya, baik melalui perladangan bergilir, Sasi, maupun praktik lainnya. Sehingga sistem yang menyesuaikan kalender kemusiman ini akan mendorong regenerasi sumber daya dan mencegah eksploitasi berlebih.
- 3) Integrasi Nilai Spiritual dan Pelestarian: Aspek spiritual menjadi landasan kuat dalam praktik pelestarian lingkungan masyarakat adat. Adanya unsur kepercayaan adat terhadap lingkungan tertentu akan mendorong kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan memberi ikatan kebatinan terhadap alam.
- 4) Kelembagaan Adat yang Kuat: Struktur kelembagaan adat yang kuat dan dihormati oleh masyarakat menjadi faktor penting dalam implementasi praktik pelestarian. Baik dari peraturan melalui tetua adat maupun otoritas dari institusi yang mengatur tentang pelestarian dan pemberdayaan lingkungan.

B. Konsep Modernisasi Dalam Pemberdayaan Lingkungan

Sebagai suatu proses transisi peralihan dari cara-cara tradisional ke langkah yang lebih rasional, efisien, dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi menurut Soerjono Soekanto, Modernisasi tak hanya menghadirkan penggunaan teknologi maju semata, melainkan

penerapan nilai-nilai modern baru yang bisa dipraktekkan dalam konteks pemberdayaan lingkungan berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam praktennya, bisa melalui beberapa cara, diantaranya :

a. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan.

Membangun kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi. Pendidikan lingkungan berfungsi untuk membentuk pola pikir modern yang peduli terhadap kelestarian alam. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui program sekolah hijau (*eco-school*), penyuluhan masyarakat, atau pelatihan berbasis komunitas. Dengan meningkatnya pengetahuan, masyarakat akan terdorong untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan, konservasi air, dan pengelolaan sampah. Transformasi pola pikir dan perilaku masyarakat.

b. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

Modernisasi menuntut penerapan inovasi dan teknologi hijau yang membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Contohnya penggunaan energi terbarukan (panel surya, biogas), sistem pertanian organik, teknologi pengolahan limbah, dan digitalisasi pengelolaan sampah. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran.

c. Pemanfaatan Digitalisasi dan Inovasi

Sosial Digitalisasi menjadi ciri utama

modernisasi. Melalui aplikasi, media sosial, dan teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses informasi lingkungan, melakukan pemantauan (*citizen science*), dan menggalang aksi sosial seperti kampanye peduli lingkungan. Inovasi sosial seperti *eco-village* dan *smart city* juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berbasis teknologi.

d. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

Lingkungan Modernisasi juga memerlukan dukungan regulasi dan kelembagaan yang kuat. Pemerintah berperan membuat kebijakan yang mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan dan memberikan insentif kepada masyarakat yang melakukan inovasi hijau. Selain itu, kelembagaan lingkungan di tingkat lokal seperti kelompok tani, karang taruna, dan komunitas hijau perlu diberdayakan agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Langkah terakhir adalah pemantauan dan evaluasi terhadap hasil program pemberdayaan lingkungan. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa teknologi dan program modernisasi benar-benar berdampak positif terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan data berbasis teknologi seperti remote sensing atau sistem informasi geografis (SIG).

C. Langkah dan Tantangan Adaptasi Kearifan Lokal dan Modernisasi Dalam

Praktek Pemberdayaan.

Langkah pemberdayaan lingkungan berasaskan kearifan lokal dan aspek modernisasi yang efektif tidak menghapus budaya lokal, tetapi justru menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dengan teknologi modern. Contohnya: masyarakat adat yang menjaga hutan dengan sistem larangan adat (pamali) bisa dipadukan dengan sistem pemantauan hutan berbasis digital (*GIS monitoring*) di suku Baduy, penggabungan pengetahuan arus laut tradisional dengan teknologi GPS dalam konservasi terumbu karang seperti suku di wakatobi, sulawesi tenggara dll.

Terlebih melalui kemajuan dalam dunia pendidikan yang merambah hingga ke masyarakat lokal. Masyarakat yang memikirkan masa depan pastinya selalu bersikap positif serta berusaha untuk memperbaiki hidup dengan inovasi baru. Pendidikan berperan penting dalam mendorong individu agar berpikir kritis dan menemukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial. (Anjani, 2022:52).

Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk penerimaan budaya. Melalui Pengintegrasian tradisi lokal ke dalam kurikulum sekolah. Sekolah yang mempromosikan pembelajaran berbasis proyek yang berakar pada kearifan lokal mendorong reinterpretasi kreatif praktek pemberdayaan lingkungan dalam lokakarya, festival, pelatihan dll,

alih-alih penolakan terhadap tradisi. Media digital menyediakan ruang baru bagi kebangkitan tradisi. Reinterpretasi yang didorong oleh media semacam ini mendorong efektifitas pengenalan dan pelestarian lingkungan adat secara global.

Penerimaan tradisi lokal terjadi melalui tiga dinamika utama:

1. Kelangsungan Budaya: Komunitas yang memandang tradisi sebagai penanda identitas lebih cenderung melestarikan dan mengadaptasinya dalam bentuk modern (misalnya, penceritaan digital, wisata warisan).
2. Negosiasi Budaya: Beberapa tradisi dimodifikasi secara selektif agar selaras dengan gaya hidup modern, seperti yang terlihat dalam upacara-upacara urban atau ritual-ritual digital.
3. Resistensi Budaya: Komunitas-komunitas tertentu menolak modernisasi untuk melindungi kemurnian budaya, yang seringkali mengakibatkan ketegangan antargenerasi. (Fatkuroji, 2022:143)

Meskipun modernisasi mendorong efisiensi dan kemajuan, modernisasi dapat secara tidak sengaja mengkomodifikasi tradisi. Pariwisata warisan, misalnya, dapat mengomersialkan praktik sakral untuk hiburan (Smith, 2021). Oleh karena itu, pelestarian budaya harus berpedoman pada kerangka etika yang menjamin keaslian dan penghormatan terhadap para pengemban budaya. Kebijakan

nasional dan kerangka kerja internasional seperti Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya (2003) menekankan partisipasi masyarakat dan pendidikan sebagai strategi krusial bagi pembangunan budaya dan lingkungan berkelanjutan. Pemerintah harus menyeimbangkan program pembangunan dengan upaya pelestarian alam. Dengan demikian, tidak akan melemahkan otoritas lokal dan penggusuran terhadap lahan adat masyarakat setempat.

Kasus lain yang kerap ditemukan misalnya banyak potensi kawasan lokal yang kaya akan Sumber Daya belum terdokumentasi secara ilmiah karena berada pada lingkup kawasan adat, sehingga sulit diintegrasikan ke dalam kebijakan modern, misalnya penetapan Kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi yang patut dilindungi. Kekurangan data tersebut menghambat pengakuan formal dan semakin memperkecil perhatian dari Masyarakat luas yang diharapkan turut awas terhadap pemberdayaan lingkungan guna mencegah eksploitasi.

D. Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Menjalankan Pemberdayaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dalam konteks pemerintahan dikenal sebagai *good environmental governance*, yaitu suatu ide yang melihat negara dan masyarakat sebagai aktor utama dalam konservasi lingkungan. Negara berfungsi sebagai institusi yang memiliki kemampuan untuk mengatur sumber

daya serta memodifikasi kondisi lingkungan dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, keberlangsungan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengontrol perilakunya sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan.

Dengan adanya konsep *good environmental governance*, kita dapat memahami bahwa ini menjadi landasan pemikiran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui kolaborasi dengan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab negara bukanlah untuk mengubah kondisi biofisik, melainkan untuk menjamin bahwa derajat dan arah serta sejauh mana keberlangsungan ekosistem dapat diselaraskan. (Nur, 2022:38)

Kesadaran dari masyarakat akan mendorong mereka untuk merespons berbagai peristiwa, baik yang terjadi di lingkungan mereka sendiri maupun yang berasal dari luar, termasuk peristiwa sosial, budaya, dan fenomena alam. Aspirasi masyarakat menjadi penggerak motivasi yang kuat dan berfungsi sebagai pendorong semangat juang bersama.

(Purniawati et al., 2020:43) menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta untuk menjaga kualitas lingkungan. Aktivitas ini memerlukan transparansi yang terstruktur dalam kebijakan dan melibatkan institusi lingkungan serta program masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengelolaan lingkungan berfungsi

sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan melalui interaksi dengan masyarakat dalam konteks tata kelola lingkungan.

Menurut Addahlawi et al., (2019) terdapat 7 indikator prinsip *good environmental governance* yang telah dikutip dari data Belbase :

1. Aturan hukum	Cara penghimpauan warga negara lewat undang-undang yang berlaku dalam aturan pelestarian lingkungan. Serta pemberian sanksi bagi pelanggar.
2. Partisipasi dan representasi	keterlibatan semua elemen dalam pengelolaan untuk mencapai sasaran, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.
3. Akses informasi	fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan atau memperoleh informasi terkait lingkungan secara langsung.
4. Transparansi Prinsip dan transparansi Akuntabilitas	menjamin ketersediaan akses informasi bagi setiap individu

	untuk menerima berita mengenai kebijakan, proses, pelaksanaan, dan hasil yang telah diraih. Prinsip akuntabilitas menjamin aktivitas dapat segala dipertanggung jawabkan secara terbuka
5. Prinsip desentralisasi	suatu kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan kebebasan
6. Lembaga dan organisasi	wadah yang memiliki peran dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan. Entitas ini dapat berupa entitas pemerintah, publik, dan swasta.
7. Akses terhadap keadilan	artinya setiap orang memiliki hak yang setara untuk mendapatkan keadilan.

KESIMPULAN

Kearifan lokal diartikan sebagai ide-ide, nilai-nilai, atau pandangan hidup dari suatu komunitas yang bersifat bijaksana dan bermakna baik, yang dipegang dan diyakini oleh komunitas tersebut serta telah dijalankan secara generasi ke generasi. Dalam kaitannya akan pemberdayaan lingkungan hidup, Kearifan lokal mencerminkan etika ekologis masyarakat yang telah teruji dan terbukti selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan hubungan manusia dan alam saling terikat sebagai satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Sebagai suatu proses transisi peralihan dari cara-cara tradisional ke langkah berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi, Modernisasi tak hanya menghadirkan penggunaan teknologi maju semata, melainkan penerapan nilai-nilai modern baru yang bisa dipraktekkan dalam konteks pemberdayaan lingkungan berkelanjutan. Pelestarian budaya harus berpedoman pada kerangka etika yang menjamin keaslian dan penghormatan terhadap para pengemban budaya. Untuk mencegah Eksploitasi, melemahkan otoritas lokal dan pengusuran terhadap lahan adat masyarakat setempat.

Konsep *good environmental governance* atau pengelolaan lingkungan, sebagai konsep yang memandang negara dan masyarakat sebagai aktor utama dalam konservasi lingkungan. Negara berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya lingkungan dalam skala besar.

dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ningrum, Epon. (2007), *Pendayagunaan Lingkungan Bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Geografi Gea Vol. 7 No. 1
- Sumaatmadja, Nursid. 1996. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, R.H. & Devika M. BR T. (2024). *Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Struktural Fungsional (Kontribusi Benua Lestari Indonesia di Kota Tangerang)*. Jurnal Ilmu sosial dan Politik. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.135>
- Mei, Reginaldis Taju. dkk. (2025). *Kearifan Lokal "Peran Tradisi Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan"*. Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Vol 9 No. 6.
- Surna Tjahja D, dkk, 2014. *Green Economy Ekonomi Hijau* edisi revisi, Bandung: Rekayasa Sains.
- El Adawiyah, S., & Ramadhan, A. I. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Model Geulis (Gerakan Lingkungan Sehat) Perwujudan Desa Siaga Di Daerah Dramaga Bogor*. Baskara, 2(2), 93–106. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.93-106>
- Sumarmi. (2015). *Local wisdom of Osing people in conserving water resources*. Jurnal Komunitas, 7(1), 43–51.
- Nababan, A. (2003). *Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat adat: Tantangan dan peluang*. Jurnal Antropologi Indonesia, 27(69), 25–37.
- Lesna Nainggolan, L. E., Teovani Lodan, K., & Salsabila, L. (2023). *Menuju Keberlanjutan Lingkungan: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Kota Batam*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 179–188. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13584>
- Permana, R. C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya,

- J. (2011). *Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. Makara, Sosial Humaniora*, 15(1), 67–76.
- Suhartini. (2009). *Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nur, M.S. & Achmad Husen. (2022), *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol. 11 No. 1.
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Environmental Management)*. Protection The of and Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 43-56.
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, K.L., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, Implementasi A. F. Prinsip (2019). *Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia*. JGG- Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, 8(2).
- Anjani, Yushinta Anjani & Binti Maunah. (2022). *Perubahan Sosial Serta Upaya Menjaga Kesenambungan Masyarakat*. JPI – Jurnal Pendidikann IPS. Hlm. 52-53.
- Fatkuroji, (2022), *Dinamika Penerimaan Terhadap Tradisi Lokal di Era Globalisasi : antara Pelestarian dan Modernisasi*. Jadwa : Jornal of islamic Education Management. Hal. 145-147.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Smith. L. (2021). *Uses of Heritage in the Age of Global Tourism*. Routledge.
- Giddens, Anthony. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press. 14-21.